

Katalog : 1413.3319

# **INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN KUDUS 2015**



<http://>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN KUDUS**

Katalog : 1413.3319

# INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN KUDUS 2015



<http://>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN KUDUS**

**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA  
KABUPATEN KUDUS 2015**

No Publikasi : 33192.1602  
Katalog BPS : 4102002.3319  
Jumlah Halaman : 79 halaman  
Ukuran Buku : 14.8 x 21 cm

Naskah : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus  
Penyunting : Tim Penyusun (BPS Kabupaten Kudus)  
Gambar : Tim Penyusun (BPS Kabupaten Kudus)  
Diterbitkan Oleh : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus  
Gambar Kulit : Tim Penyusun (BPS Kabupaten Kudus)

**Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya**

## KATA PENGANTAR

Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan bukan alat dari pembangunan. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dari seberapa besar permasalahan mendasar di masyarakat dapat teratasi.

Buku Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kudus Tahun 2015 memberikan gambaran tentang pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di Kabupaten Kudus dan perbandingan dengan daerah lain di Wilayah Bakorwil Pati.

Semoga buku ini dapat dipergunakan dan bermanfaat, serta turut memberikan sumbangsih dalam pembangunan manusia di Kabupaten Kudus. Untuk penyempurnaan publikasi yang akan datang, kritik dan saran tetap kami harapkan.

Kudus, Desember 2016

KEPALA BPS KABUPATEN KUDUS

Sapto Harjuli Wahyu, S.Si

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan dan Sasaran .....	2
1.3 Ruang Lingkup .....	3
1.4 Sistematika Penyusunan Laporan .....	4
<b>BAB II. SUMBER DATA DAN METODOLOGI .....</b>	<b>5</b>
2.1 Pengertian Indikator .....	7
2.2 Indikator-Indikator Pembangunan Manusia. ....	9
2.3 Metode Penghitungan IPM .....	11
2.4 Rumus dan Ilustrasi Penghitungan IPM .....	18
<b>BAB III. KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL .....</b>	<b>21</b>
<b>BAB IV. GAMBARAN UMUM KABUPATEN KUDUS . . .</b>	<b>27</b>
4.1 Gambaran Umum Wilayah .....	27
4.2 Potensi Daerah .....	29

BAB V. HASIL STUDI .....	43
5.1 Indeks Pembangunan Manusia .....	43
5.2 Komponen Indeks Pembangunan Manusia.....	47
5.3 Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM)	54
BAB VI. PENUTUP .....	75
6.1 Kesimpulan .....	75
6.2 Saran dan Rekomendasi.....	77

<http://kuduskab.bps.go.id>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM Tahun 2005	20
Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan	28
Tabel 4.2 Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Tahun 2014–2015	31
Tabel 4.3 Jumlah Investor dan Besarnya Investasi Menurut Kecamatan Tahun 2014–2015 (Juta Rp)	32
Tabel 4.4 Pertumbuhan PDRB dan Kontribusinya Tahun 2014–2015	34
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk dan Kepadatannya Tahun 2015	36
Tabel 4.6 Penduduk Usia 15 Tahun keatas Menurut Jenis Kegiatan Hasil Sakernas Tahun 2015	40
Tabel 4.7 Penduduk 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kudus Hasil Sakernas Tahun 2015	42
Tabel 5.1 Nilai IPM Kabupaten Kudus dan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2014–2015	44
Tabel 5.2 Komponen IPM Kabupaten Kudus dan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2015	45
Tabel 5.3 Angka Harapan Hidup Kabupaten Kudus dan Kabupaten sekitarnya Tahun 2014–2015	49

Tabel 5.4 Angka Harapan Lama Sekolah Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sekitarnya, Tahun 2014–2015	52
Tabel 5.5 Angka Pengeluaran per Kapita Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2014–2015	54
Tabel 5.6 Banyaknya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas, Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin) menurut Kecamatan Tahun 2015	56
Tabel 5.7 Banyaknya Puskesmas dan Dokter per Puskesmas Menurut kecamatan tahun 2015	57
Tabel 5.8 Banyaknya Dokter menurut Keahlian dan Kecamatan Tahun 2015	58
Tabel 5.9 Banyaknya Perawat, Bidan dan Tenaga Kesehatan Lainnya menurut Kecamatan Tahun 2015	60
Tabel 5.10 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Satu Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kudus Tahun 2014–2015	61
Tabel 5.11 Persentase Kunjungan Penduduk yang Berobat Jalan Dalam Satu Bulan Terakhir Menurut Tempat Berobat 2014–2015	62
Tabel 5.12 Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama di Kabupaten Kudus Tahun 2014–2015	64
Tabel 5.13 Jumlah Rumah Tangga Kabupaten Kudus Menurut Kecamatan Tahun 2014–2015	65



Tabel 5.14	Persentase Rumah Tangga menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Kabupaten Kudus Tahun 2014–2015	67
Tabel 5.15	Persentase rumah Tangga menurut Luas lantai Bangunan Tempat Tinggal Kabupaten Kudus Tahun 2014–2015	69
Tabel 5.16	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Kudus Tahun 2014–2015	70
Tabel 5.17	Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar Bangunan Tempat Tinggal di Kab. Kudus tahun 2014–2015	72
Tabel 5.18	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Kudus Tahun 2014–2015	74

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perubahan Metodologi IPM

18

<http://kuduskab.bps.go.id>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan pembangunan di Kabupaten Kudus berorientasi pada terwujudnya Kudus yang lebih sejahtera. Salah satu tujuan pembangunan yang hendak dicapai yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan perwujudan tujuan pembangunan jangka panjang dari suatu masyarakat, dengan meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif dan efisien sehingga dapat berkompetisi di segala bidang dengan kualitas yang diandalkan (Suryadi, 1999). Menurut *United Nation Development Program* (UNDP), 1990, pembangunan manusia merupakan model pembangunan yang ditujukan untuk memperluas pilihan yang dikembangkan melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Konsep pembangunan manusia sama sekali tidak berarti meninggalkan berbagai strategi pembangunan terdahulu, yang antara lain bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, mengurangi tingkat kemiskinan dan mencegah perusakan lingkungan.

Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam proses pemakmuran sebuah wilayah. Sumberdaya manusia memiliki peran ganda, baik sebagai obyek namun sekaligus sebagai subyek pembangunan. Sebagai obyek pembangunan, manusia merupakan sasaran pembangunan untuk disejahterakan, dan sebagai subyek pembangunan, manusia berperan sebagai pelaku pembangunan yang sangat menentukan kemajuan. Untuk itu pemerintah yang pro pembangunan manusia harus bisa menjaga keselarasan manusia baik sebagai objek maupun subjek pembangunan agar hubungan itu berjalan positif dan berkelanjutan.

Konsep pembangunan yang dikembangkan oleh badan dunia tersebut tentunya jauh lebih luas, karena mengandung empat unsur yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*). Dengan peningkatan kemampuan, kreatifitas dan produktivitas manusia maka akan meningkatkan pula kemampuan manusia menjadi insan pertumbuhan yang efektif. Pertumbuhan ekonomi juga harus dikombinasikan dengan pemerataan hasil-hasilnya dan pemerataan kesempatan harus tersedia baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

## **1.2 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dari penulisan ini adalah menyajikan dan

menganalisis data IPM yang dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menyusun program pembangunan di masa mendatang maupun sebagai alat evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan pada masa sebelumnya. Selanjutnya diharapkan dapat menjadi masukan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan sumber daya manusia di Kabupaten Kudus, termasuk penentuan sektor-sektor prioritas dalam pembangunan manusia.

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini meliputi:

- a. Teridentifikasinya kondisi beberapa variabel sektoral dalam pembangunan manusia, meliputi sektor-sektor: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di Kabupaten Kudus.
- b. Memberikan gambaran permasalahan yang ada di bidang pembangunan manusia di Kabupaten Kudus.

### **1.3 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup materi penulisan ini meliputi :

- a. Identifikasi kondisi variabel kunci dalam pengukuran besaran IPM yang meliputi ; lamanya hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup (*decent living*).
- b. Identifikasi permasalahan mendasar pada sektor-sektor kunci yang terkait dengan IPM, meliputi indikator kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
- c. Pengukuran besaran angka IPM Kabupaten Kudus.

- d. Analisis Situasi Pembangunan Manusia di Kabupaten Kudus.
- e. Rumusan kebijakan dalam rangka pembangunan manusia berdasarkan besaran angka IPM yang diperoleh dan hasil analisis situasi pembangunan manusia di Kabupaten Kudus.

#### **1.4 Sistematika Penyusunan Analisis**

Sistematika penulisan analisis terdiri dari enam (6) bab, yaitu :

- BAB I      Pendahuluan; berisi latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, dan sistematika penyusunan laporan.
- BAB II      Sumber Data dan Metodologi; berisi pengertian indikator-indikator pembangunan, metode penghitungan IPM, rumus dan ilustrasi penghitungan IPM dan Ukuran Perkembangan IPM.
- BAB III     Konsep dan Definisi Operasional ; berisi indikator dan definisinya.
- BAB IV     Gambaran Umum Kabupaten Kudus; berisi gambaran umum seputar wilayah dan potensi daerah Kabupaten Kudus.
- BAB V      Hasil Studi; berisi ulasan-ulasan beserta data empiris Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Komponen Indeks Pembangunan Manusia, dan Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM).
- BAB VI     Penutup; berisi kesimpulan dan saran hasil studi.

## **BAB II**

### **SUMBER DATA DAN METODOLOGI**

Paradigma pembangunan yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun menilai dan mengukur kinerjanya selalu mengalami perkembangan dan perubahan model atau polanya. Pada dekade 60-an, paradigma yang digunakan yaitu pembangunan yang berorientasi pada produksi (*production centered development*). Pada dekade 70-an pola ini berubah menjadi paradigma pembangunan yang lebih menekankan pada distribusi hasil-hasil pembangunan (*distribution growth development*). Selanjutnya pada dekade 80-an, muncul paradigma pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (*basic need development*), dan akhirnya menuju paradigma pembangunan yang terpusat pada manusia (*human centered development*) yang muncul pada tahun 1990-an.

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan

keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi).

Menurut UNDP (1990:1), Pembangunan Manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*“a process of enlarging people’s choices”*). Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka; oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja;

Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal. Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah penduduk karena penduduk adalah kekayaan nyata suatu negara.

Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya.

Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan; dan



Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

## **2.1 Pengertian Indikator**

Petunjuk yang memberikan indikasi tentang sesuatu keadaan dan merupakan refleksi dari keadaan tersebut disebut juga sebagai Indikator. Dengan kata lain, indikator merupakan variabel penolong dalam mengukur perubahan. Variabel-variabel ini terutama digunakan apabila perubahan yang akan dinilai tidak dapat diukur secara langsung. Indikator yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: (1) sah (*valid*), indikator harus dapat mengukur sesuatu yang sebenarnya akan diukur oleh indikator tersebut; (2) objektif, untuk hal yang sama, indikator harus memberikan hasil yang sama pula, walaupun dipakai oleh orang yang berbeda dan pada waktu yang berbeda; (3) sensitif, perubahan yang kecil mampu dideteksi oleh indikator; (4) spesifik, indikator hanya mengukur perubahan situasi yang dimaksud. Namun demikian perlu disadari bahwa tidak ada ukuran baku yang benar-benar dapat mengukur tingkat kesejahteraan seseorang atau masyarakat.

Indikator bisa bersifat tunggal (indikator tunggal) yang isinya terdiri dari satu indikator, seperti Angka Kematian Bayi (AKB) dan bersifat jamak (indikator komposit) yang merupakan

gabungan dari beberapa indikator, seperti Indeks Mutu Hidup (IMH) yang merupakan gabungan dari 3 indikator yaitu Angka Melek Huruf (AMH), Angka Kematian Bayi (AKB) dan angka harapan hidup dari anak usia 1 tahun ( $e_1$ ).

Menurut jenisnya, indikator dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok indikator, yaitu:

- (a) Indikator Input, yang berkaitan dengan penunjang pelaksanaan program dan turut menentukan keberhasilan program, seperti: rasio murid-guru, rasio murid-kelas, rasio dokter, rasio puskesmas.
- (b) Indikator Proses, yang menggambarkan bagaimana proses pembangunan berjalan, seperti: Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), rata-rata jumlah jam kerja, rata-rata jumlah kunjungan ke puskesmas, persentase anak balita yang ditolong dukun.
- (c) Indikator Output/Outcome, yang menggambarkan bagaimana hasil (output) dari suatu program kegiatan telah berjalan, seperti: persentase penduduk dengan pendidikan SMTA ke atas, AKB, angka harapan hidup, TPAK, dan lain-lain.

## **2.2 Indikator-Indikator Pembangunan Manusia**

Upaya untuk mengetahui dan mengidentifikasi seberapa besar kemajuan pembangunan yang telah dicapai suatu wilayah tentunya diperlukan data-data yang cukup *up to date* dan akurat. Data-data yang disajikan diharapkan sebagai bahan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh pemerintah tersebut. Apakah pembangunan puskesmas dan puskesmas pembantu telah secara nyata meningkatkan derajat kesehatan masyarakat? Apakah pembangunan gedung SD juga telah mampu meningkatkan tingkat partisipasi sekolah di wilayah ini? Apakah program Paket Kejar telah mampu meningkatkan kemampuan baca tulis penduduk secara umum? Dalam konteks tersebut diatas diperlukan pula ukuran-ukuran yang tepat untuk digunakan sebagai indikator. Untuk itu perlu kiranya dianalisis mengenai berbagai ukuran-ukuran yang biasa digunakan sebagai indikator pembangunan.

Berbagai program seperti pengadaan pangan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan dan peningkatan kegiatan olah raga dilaksanakan dalam upaya peningkatan taraf kualitas fisik penduduk. Namun demikian seperti dikatakan Azwini, Karomo dan Prijono (1988:469), tolok ukur yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan (pembangunan) dalam beberapa hal agak sulit ditentukan. Alat ukur yang sering digunakan untuk menilai kualitas hidup selama ini sebenarnya hanya mencakup kualitas fisik, tidak

termasuk kualitas non fisik. Kesulitan muncul terutama karena untuk menilai keberhasilan pembangunan non-fisik indikatornya relatif lebih abstrak dan bersifat komposit.

Salah satu pengukuran taraf kualitas fisik penduduk yang banyak digunakan adalah Indeks Mutu Hidup (IMH). Ukuran ini sebenarnya banyak mendapat kritik (Hicks and Streeten, 1979, Rat, 1982, Holidin, 1993a, dan Holidin 1993b) karena mengandung beberapa kelemahan, terutama yang menyangkut aspek statistik dari keterkaitan antar variabel yang digunakannya. Terlepas dari kelemahan tersebut, ada nilai lebih dari IMH yang membuat indikator ini banyak digunakan sebagai ukuran untuk menilai keberhasilan program pembangunan pada satu wilayah. Nilai lebih dari IMH ini adalah kesederhanaan di dalam penghitungannya. Di samping itu, data yang digunakan untuk menghitung IMH ini pada umumnya sudah banyak tersedia. IMH juga bisa dihitung setiap tahun untuk setiap wilayah (nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota), sehingga dapat dilakukan perbandingan antar wilayah.

Sejalan dengan makin tingginya intensitas dalam permasalahan pembangunan, kesederhanaan IMH pada akhirnya kurang mampu untuk menjawab tuntutan perkembangan pembangunan yang semakin kompleks itu. Untuk itu perlu indikator lain yang lebih representatif dengan tuntutan permasalahan. Dalam

kaitan ini, indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM; *Human Development Index*) merupakan salah satu alternatif yang bisa diajukan. Indikator ini, disamping mengukur kualitas fisik; tercermin dari angka harapan hidup; juga mengukur kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat di wilayah itu; tercermin dari nilai *purchasing power parity index* (ppp). Jadi indikator IPM terasa lebih komprehensif dibandingkan dengan IMH.

### **2.3 Metode Penghitungan IPM**

Untuk menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara berkelanjutan diperlukan satu set indikator komposit yang cukup representatif. IPM adalah suatu indikator pembangunan manusia yang diperkenalkan UNDP pada tahun 1990. Pada dasarnya IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan hidup layak (*decent living*). Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir; pengetahuan diukur berdasarkan harapan lama sekolah serta rata-rata lama sekolah ; dan hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita

yang didasarkan pada *Purchasing Power Parity* (paritas daya beli) dalam rupiah.

Usia hidup diukur dengan angka harapan hidup atau  $e_0$  yang dihitung menggunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel) berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Komponen pengetahuan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang dihitung berdasarkan data Suseda. Sebagai catatan, UNDP dalam publikasi tahunan *Human Development Report* (HDR). Indikator angka melek huruf diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan; yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil per kapita yang telah disesuaikan. Sebagai catatan, UNDP menggunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) sebagai ukuran komponen tersebut karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara.

Pada tahun 2010, UNDP merubah metodologi penghitungan IPM. Kali ini perubahan drastis terjadi pada penghitungan IPM. UNDP menyebut perubahan yang dilakukan pada penghitungan IPM

sebagai metode baru. Beberapa indikator diganti menjadi lebih relevan. Indikator Angka Partisipasi Kasar gabungan (*Combine Gross Enrollment Ratio*) diganti dengan indikator Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*). Indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain itu, cara penghitungan juga ikut berubah. Metode rata-rata aritmatik diganti menjadi rata-rata geometrik untuk menghitung indeks komposit.

Perubahan yang dilakukan UNDP tidak hanya sebatas itu. Setahun kemudian, UNDP menyempurnakan penghitungan metode baru. UNDP merubah tahun dasar penghitungan PNB per kapita dari 2005 menjadi 2008. Tiga tahun berselang, UNDP melakukan penyempurnaan kembali penghitungan metode baru. Kali ini, UNDP merubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik dan tahun dasar PNB per kapita. Serangkaian perubahan yang dilakukan UNDP bertujuan agar dapat membuat suatu indeks komposit yang cukup relevan dalam mengukur pembangunan manusia.

UNDP memperkenalkan penghitungan IPM metode baru dengan beberapa perbedaan mendasar dibanding metode lama. Setidaknya, terdapat dua hal mendasar dalam perubahan metode baru ini. Kedua hal mendasar terdapat pada aspek indikator dan cara penghitungan indeks. Pada metode baru, UNDP memperkenalkan

indikator baru pada dimensi pengetahuan yaitu Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*). Indikator ini digunakan untuk menggantikan indikator AMH yang memang saat ini sudah tidak relevan karena capaian di banyak negara sudah sangat tinggi. UNDP juga menggunakan indikator PNB per kapita untuk menggantikan indikator PDB per kapita.

Selain indikator baru, UNDP melakukan perubahan cara penghitungan indeks. Untuk menghitung agregasi indeks, digunakan rata-rata geometrik (*geometric mean*). Cara penghitungan indeks yang terbilang baru ini cenderung sensitif terhadap ketimpangan. Tidak seperti rata-rata aritmatik yang dapat menutupi ketimpangan yang terjadi antardimensi, rata-rata geometrik menuntut keseimbangan ketiga dimensi IPM agar capaian IPM menjadi optimal.

Dengan melihat secara mengalam tentang kelemahan pada penghitungan metode lama, Indonesia merasa perlu memperbarui penghitungan untuk menjawab tantangan masyarakat internasional. Pada tahun 2014, Indonesia secara resmi melakukan penghitungan IPM dengan metode baru. Untuk mengaplikasikan metode baru, sumber data yang tersedia di Indonesia antara lain:

- Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010-SP2010, Proyeksi Penduduk)
- Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei



Sosial Ekonomi Nasional-SUSENAS)

- PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS.

Indonesia melakukan beberapa penyesuaian terhadap metode baru. Penyesuaian ini dilakukan pada indikator PNB per kapita karena ketersediaan data. Dari empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM metode baru, tiga diantaranya sama persis dengan UNDP. Khusus untuk PNB per kapita, indikator ini diproksi dengan pengeluaran per kapita.

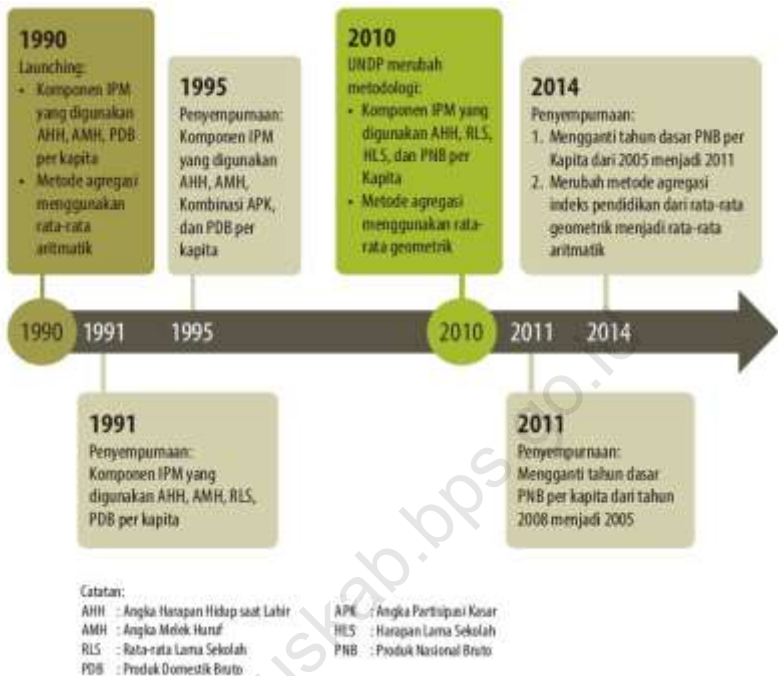
Pengeluaran per kapita yang dipakai dalam metode baru adalah pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity-PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan metode Rao.

Indikator angka harapan hidup saat lahir tidak mengalami perubahan pada metode baru. Akan tetapi, sumber data yang

digunakan dalam penghitungan indikator ini telah diperbarui dengan menggunakan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010). Indikator ini menjadi indikator penting untuk melihat derajat kesehatan suatu masyarakat. Indikator ini tetap dipertahankan keberadaannya karena selain relevansinya, juga ketersediaan hingga tingkat kabupaten/kota cukup memadai. Indikator angka melek huruf diganti dengan indikator baru yang disebut harapan lama sekolah. Sedangkan indikator rata-rata lama sekolah tetap dipertahankan karena menggambarkan stok yang terjadi pada dunia pendidikan. Namun, cakupan penghitungan yang digunakan pada metode baru telah diganti. Pada metode lama, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Sementara pada metode baru, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas sesuai dengan rekomendasi UNDP. Selain untuk keterbandingan dengan internasional, alasan penting lain yaitu bahwa pada umumnya penduduk berusia 25 ke atas tidak bersekolah lagi. Walaupun sebagian kecil ada yang masih bersekolah, jumlahnya tidak signifikan. Penduduk usia 25 tahun ke atas merupakan stok pendidikan yang dimiliki oleh suatu wilayah. Indikator pengeluaran per kapita juga tetap dipertahankan keberadaannya karena cukup operasional dari sisi ketersediaan data. Pada dasarnya, indikator PNB per kapita lebih menggambarkan kesejahteraan masyarakat dibanding pengeluaran per kapita. Namun data ini tidak tersedia

hingga tingkat kabupaten/kota. Meski pengeluaran per kapita tetap digunakan, ada perubahan pada penghitungan paritas daya beli yang digunakan. Pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam penghitungan paritas daya beli. Sementara pada metode baru terdapat 96 komoditas yang digunakan. Hal ini dilakukan karena selama 1990 hingga 2014 telah terjadi banyak perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga komoditas penghitungan paritas daya beli juga harus diperbarui.

Pada metode lama, agregasi indeks komposit menggunakan rata-rata aritmatik. Sementara pada metode baru menggunakan rata-rata geometrik. Metode agregasi indeks komposit yang digunakan pada metode baru merupakan penyempurnaan metode lama. Seperti pada penjelasan sebelumnya, rata-rata geometrik memiliki keunggulan dalam mendeteksi ketimpangan dibanding rata-rata aritmatik. Kecepatan perubahan IPM juga menjadi salah satu fokus dalam pembangunan manusia. Pada metode lama, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan reduksi shortfall. Pada metode baru, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan pertumbuhan aritmatik.



Gambar 1.1 Perubahan Metodologi IPM

## 2.4 Rumus dan Ilustrasi Penghitungan IPM

Setiap komponen IPM distandarisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

$$\text{Dimensi Kesehatan : } I_{\text{kehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\text{maks}} - AHH_{\min}}$$

$$\text{Dimensi Pendidikan : } I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\text{maks}} - HLS_{\min}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\text{maks}} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

$$\text{Dimensi Pengeluaran : } I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

Dalam menghitung IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$$

Dalam menghitung IPM, diperlukan nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing indikator. Berikut tabel yang menyajikan nilai-nilai tersebut.

Tabel 2.1 Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	20	20	85	85
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP US)	1.007.436 * (Rp)	107.721 (PPP US)	26.572.352 ** (Rp)

Keterangan:

\* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua

\*\* Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut :

$$\text{Indeks } I(i) = (I(i) - I(i)\text{min}) / (I(i)\text{maks} - I(i)\text{min})$$

Dimana,

$I(i)$  : Indikator ke-i (i = 1,2,3)

$I(i)\text{maks}$  : Nilai maksimum  $I(i)$

$I(i)\text{min}$  : Nilai minimum  $I(i)$

### BAB III

#### KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL

Untuk bisa melihat dengan jelas dan terarah beragam permasalahan pembangunan manusia selama ini dan bagaimana mengimplementasikan program-program pembangunan secara baik dan terukur diperlukan ukuran atau indikator yang handal. Beberapa indikator yang sering digunakan diantaranya adalah :

- **Rasio jenis kelamin** Perbandingan antara penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan, dikalikan 100.
- **Angka ketergantungan** Perbandingan antara jumlah penduduk usia < 15 tahun ditambah usia > 65 tahun terhadap penduduk usia 15 - 64 tahun, dikalikan 100.
- **Rata-rata Lama Sekolah** Lama sekolah (tahun) penduduk usia 15 tahun ke atas.
- **Angka Partisipasi Murni SD** Proporsi penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di SD
- **Angka Partisipasi Murni SLTP** Proporsi penduduk usia 13 - 15 tahun yang sedang bersekolah di SLTP

- **Angka partisipasi Murni SLTA** Proporsi penduduk usia 16 - 18 tahun yang sedang bersekolah di SLTA
- **Angka Harapan Lama Sekolah** Proporsi lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.
- **Persentase penduduk dengan pendidikan SLTP ke atas** Proporsi penduduk yang menamatkan pendidikan SLTP atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi
- **Jumlah penduduk usia sekolah** Banyaknya penduduk yang berusia antara 7 sampai 24 tahun
- **Bekerja** Melakukan kegiatan/ pekerjaan paling sedikit 1 (satu) jam berturut-turut selama seminggu dengan maksud untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja.
- **Angkatan Kerja** Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau mencari pekerjaan.
- **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja** Perbandingan angkatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun



- **Angka Pengangguran Terbuka** Perbandingan penduduk yang mencari kerja terhadap angkatan kerja
- **Persentase pekerja yang setengah menganggur** Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu
- **Persentase pekerja dengan status berusaha sendiri** Proporsi penduduk usia 15 tahun keatas dengan status berusaha sendiri
- **Persentase pekerja dengan status berusaha sendiri dibantu pekerja tidak tetap** Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas dengan status berusaha sendiri dibantu pekerja tak dibayar
- **Persentase pekerja dengan status berusaha dengan buruh tetap** Proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang berusaha dengan buruh tetap
- **Persentase pekerja dengan status berusaha pekerja tak dibayar** Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas dengan status pekerja keluarga pekerja tak dibayar
- **Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga medis** Proporsi balita yang kelahirannya ditolong oleh tenaga medis ( dokter, bidan, dan tenaga medis lainnya )

- **Angka Harapan Hidup waktu lahir** Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk
- **Angka Kematian Bayi** Besarnya kemungkinan bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun, dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup.
- **Persentase rumah tangga berlantai tanah** Proporsi rumah tangga yang tinggal dalam rumah dengan lantai tanah
- **Persentase rumah tangga beratap layak** Proporsi rumah tangga yang menempati rumah dengan atap layak (atap selain dari dedaunan ).
- **Persentase rumah tangga berpenerangan Listrik** Proporsi rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik
- **Persentase rumah tangga bersumber air minum leding** Proporsi rumah tangga dengan sumber air minum leding

- **Persentase rumah tangga bersumber air minum bersih** Proporsi rumah tangga dengan sumber air minum pompa / sumur / mata air yang jaraknya lebih besar dari 10 meter dengan tempat penampungan limbah / kotoran terdekat
- **Persentase rumah tangga berjamban dengan tangki septik** Proporsi rumah tangga yang mempunyai jamban dengan tangki septik
- **Pengeluaran per Kapita Disesuaikan** Pengeluaran per kapita untuk makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

- **Gini Rasio** Ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Gini Rasio terletak antara 0 yang mencerminkan pemerataan sempurna dan 1 yang menggambarkan ketidak merataan sempurna.
- **Penduduk Miskin** Penduduk yang secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan setara 2100 kalori dan kebutuhan non makanan yang mendasar.
- **Garis Kemiskinan** Suatu batas dimana penduduk dengan pengeluaran kurang dari batas tersebut dikategorikan sebagai miskin. Garis kemiskinan terdiri dari dua komponen yaitu komponen batas kecukupan pangan (GKM), dan komponen batas kecukupan non makanan (GKNM)

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

#### **4.1 Gambaran Umum Wilayah**

##### **4.1.1 Kondisi Geografis**

Letak geografis Kabupaten Kudus berada pada posisi antara 110°36' dan 110°50' Bujur Timur dan antara 6°51' dan 7°16' Lintang Selatan. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 km dan dari utara ke selatan 22 km. Topografinya terbagi atas dua bagian, yaitu dataran rendah di wilayah bagian selatan dan dataran tinggi di wilayah bagian utara.

Kabupaten Kudus bercurah hujan relatif rendah, pada tahun 2015 curah hujan yang terjadi 2.344 mm/tahun dan banyaknya hari hujan 78 hari. Adapun ketinggian Kabupaten Kudus rata-rata  $\pm 55$  m di atas permukaan laut, beriklim tropis dan bertemperatur sedang dengan suhu udara berkisar rata-rata antara 19,48 °C sampai dengan 31,54 °C, dengan kelembaban udara rata-rata berkisar 68,80-76,80 persen pada tahun 2015.

##### **4.1.2 Letak Wilayah**

Kabupaten Kudus sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah terletak di antara empat kabupaten di Jawa Tengah, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten

Pati, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara.

Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas		Jumlah Desa/Kelurahan
	Ha	%	
(1)	(2)	(3)	(4)
010 Kaliwungu	3.271	7,69	15
020 Kota	1.047	2,46	25
030 Jati	2.630	6,19	14
040 Undaan	7.177	16,88	16
050 Mejobo	3.677	8,65	11
060 Jekulo	8.292	19,50	12
070 Bae	2.332	5,49	10
080 Gebog	5.506	12,95	11
090 Dawe	8.584	20,19	18
<b>Kabupaten Kudus</b>	<b>42.516</b>	<b>100,00</b>	<b>132</b>

Sumber : BPS Kabupaten Kudus

Secara administratif Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 kecamatan, dengan 123 desa serta 9 kelurahan yang pada tahun 2015

terbagi menjadi 716 RW dan 3771 RT. Kabupaten Kudus merupakan daerah kabupaten paling kecil di wilayah Jawa Tengah, yaitu dengan luas wilayah hanya 42,516 km<sup>2</sup>. Kecamatan Dawe merupakan kecamatan paling luas yaitu 8,584 km<sup>2</sup> atau mencapai 20,19 persen wilayah Kabupaten Kudus, sedangkan Kecamatan Kota merupakan daerah paling kecil wilayahnya, hanya 1,047 km<sup>2</sup> atau 2,46 persen dari wilayah Kabupaten Kudus. Walaupun demikian Kecamatan Kota merupakan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak, yaitu 25 desa/kelurahan, sedangkan Kecamatan Bae hanya terdiri dari 10 desa dan merupakan kecamatan paling sedikit jumlah desanya.

## **4.2 Potensi Daerah**

### **4.2.1 Potensi Ekonomi**

Sektor Industri merupakan tiang penyangga utama perekonomian Kabupaten Kudus dengan kontribusi sebesar 81,09 persen terhadap PDRB Kabupaten Kudus tahun 2015. Menurut BPS, sektor industri dibedakan dalam kelompok industri besar, industri sedang, industri kecil, dan industri rumah tangga. Industri besar adalah perusahaan dengan tenaga kerja 100 orang atau lebih, industri sedang adalah perusahaan dengan tenaga kerja 20 sampai 99 orang, industri kecil adalah perusahaan dengan tenaga kerja 5 sampai 19 orang, dan industri rumah tangga adalah perusahaan dengan tenaga

kerja kurang dari 5 orang. Jumlah industri besar pada tahun 2014 berjumlah 81 perusahaan dan mampu menyerap 95.867 tenaga kerja, sedangkan industri sedang berjumlah 98 perusahaan dengan serapan tenaga kerja sejumlah 3.989 orang.

Dilihat dari jenis komoditi, perusahaan industri tembakau mendominasi produksi perusahaan, yaitu mencapai 34,25 persen dari total usaha industri di Kabupaten Kudus tahun 2014, diikuti industri pakaian jadi sebesar 19,89 persen, industri makanan dan minuman serta industri kertas dan barang dari kertas sebesar 8,29 persen, industri kulit dan barang dari kulit sebesar 6,08 persen, dan yang paling sedikit adalah industri barang galian bukan logam sebesar 1,10 persen. Sedangkan penyerapan tenaga kerja terbesar masih dari industri tembakau yaitu sebesar 75,98 persen serta kertas dan barang dari kertas sebesar 9,91 persen, diikuti industri Mesin, radio, TV, Peralatan Komunikasi dan Perlengkapannya sebesar 4,07 persen, yang paling kecil penyerapan tenaga kerja dari Industri barang galian bukan logam sebesar 0,06 persen.

Data dari Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus, jumlah industri besar/sedang dan kecil/menengah di Kabupaten Kudus pada Tahun 2015 sebanyak 12.957 unit perusahaan dan menyerap tenaga kerja sebanyak 250.517 orang tenaga kerja. Jumlah industri terbanyak terdapat di Kecamatan Kota Kudus sebesar 2.182 dengan serapan tenaga kerja sebesar 138.689



orang. Jumlah usaha industri paling kecil terdapat di Kecamatan Undaan sebesar 478 dengan serapan tenaga kerja sebesar 2.054 orang.

Tabel 4.2 Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Tahun 2014 – 2015

Kecamatan	2014		2015	
	Industri	Tenaga Kerja	Industri	Tenaga Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
010 Kaliwungu	1 848	13 447	1 851	13 515
020 Kota	2 180	138 585	2 182	138 689
030 Jati	1 591	28 046	1 593	28 126
040 Undaan	477	2 049	478	2 054
050 Mejobo	1 822	4 652	1 825	4 688
060 Jekulo	1 076	5 574	1 078	5 607
070 Bae	1 283	30 861	1 285	30 929
080 Gebog	1 249	20 426	1 252	20 503
090 Dawe	1 412	6 399	1 413	6 406
<b>Kabupaten Kudus</b>	<b>12 938</b>	<b>250 039</b>	<b>12 957</b>	<b>250 517</b>

Sumber : Dinas Perinkop dan UMKM Kab. Kudus

Besarnya kontribusi sektor industri menunjukkan bahwa sektor ini memegang peranan penting dalam menopang

perekonomian Kabupaten Kudus, memberi kontribusi sebesar 81,09 persen terhadap total pendapatan domestik regional bruto Kabupaten Kudus. Walaupun secara geografis Kabupaten Kudus merupakan kabupaten dengan wilayah terkecil di Jawa Tengah, namun dari sisi industri memiliki potensi dan peluang pasar yang dapat diandalkan.

Tabel 4.3 Jumlah Investor dan Besarnya Investasi Menurut Kecamatan Tahun 2014 – 2015 (Juta Rp)

Kecamatan	2014		2015	
	Jumlah Investor	Besar Investasi	Jumlah Investor	Besar Investasi
(1)	(3)		(4)	(5)
010 Kaliwungu	104	61 413,50	115	1 050 755,78
020 Kota	315	6 827 830,43	339	10 506 067,45
030 Jati	202	1 693 823,29	169	986 309,21
040 Undaan	50	9 917,00	42	8 416,00
050 Mejobo	101	30 104,00	86	52 554,50
060 Jekulo	98	129 171,04	77	73 008,00
070 Bae	103	30 816,98	109	1 092 582 582,97
080 Gebog	71	29 342,55	68	3 799 005,60
090 Dawe	65	12 859,00	78	48 115,77
Kabupaten Kudus	1 109	8 825 277,80	1 083	17 616 815,29

Sumber : Dinas Perinkop dan UMKM, dan Kantor PMPTT Kab. Kudus

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu tolok ukur pembangunan di suatu daerah, karena terdapat kaitan yang erat antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pembangunan.

Tabel 4.4 Pertumbuhan PDRB dan Kontribusinya  
Tahun 2014 – 2015

Lapangan Usaha	2014*		2015**	
	Pertumbuhan %	Kontribusi %	Pertumbuhan %	Kontribusi %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-0,02	2,31	5,65	2,40
Pertambangan dan Penggalian	7,12	0,11	3,67	0,12
Industri Pengolahan	4,26	81,75	3,43	81,09
Pengadaan Listrik dan Gas	4,08	0,04	-2,44	0,04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,98	0,02	2,22	0,02
Konstruksi	4,42	3,10	6,06	3,19
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,64	5,31	6,67	5,53
Transportasi dan Pergudangan	8,51	0,97	9,59	1,03

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,64	1,08	10,20	1,16
Informasi dan Komunikasi	13,16	0,52	9,53	0,52
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,97	1,66	7,55	1,73
Real Estate	7,21	0,51	7,61	0,53
Jasa Perusahaan	7,12	0,09	8,86	0,09
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,88	0,77	5,32	0,78
Jasa Pendidikan	10,15	0,99	7,08	1,00
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,17	0,28	7,07	0,29
Jasa lainnya	8,51	0,49	4,02	0,49
PDRB	4,47	100,00	4,08	100,00

*Sumber : Publikasi PDRB Kabupaten Kudus Tahun 2016*

Di Kabupaten Kudus, sektor Industri pengolahan menunjukkan pertumbuhan yang menurun, dimana pada tahun 2014 menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,26 persen, tapi pada tahun 2014 menjadi 3,43 persen. Artinya pertumbuhan sektor tersebut tetap positif walaupun dengan besaran yang lebih kecil. Lapangan usaha industri pengolahan masih menempati urutan tertinggi dalam penyumbang nilai PDRB, yakni sebesar 81,09 persen dari seluruh nilai total PDRB. Sektor kedua yang memberikan kontribusi cukup besar adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sektor ini pada tahun 2015

memberikan sumbangan sebesar 5,53 persen lebih besar dari tahun 2014 (5,31 persen).

Potensi ekonomi suatu daerah khususnya sektor perdagangan dapat diketahui dari banyaknya pasar yang ada. Pasar merupakan media pertemuan antara penjual dan pembeli, sehingga makin ramai transaksi terjadi berarti makin tinggi pula potensi sektor perdagangan. Jumlah pasar di Kabupaten Kudus tahun sebanyak 88 pasar, yang terdiri dari 56 pasar modern, 5 pasar daerah, 25 pasar desa dan 2 pasar hewan yang berada di Kabupaten Kudus. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup besar jika dibandingkan dengan jumlah kecamatan yang ada. Kecamatan Kota Kudus menjadi kecamatan dengan jumlah pasar terbanyak yaitu 23 pasar. Sedangkan Kecamatan Dawe menjadi kecamatan dengan jumlah pasar paling sedikit dengan jumlah pasar hanya sejumlah 3 buah pasar.

#### **4.2.2 Sumber Daya Manusia**

Manusia di samping sebagai pelaku pembangunan juga sekaligus sebagai sasaran pembangunan. Data-data kependudukan merupakan data pokok yang dibutuhkan baik kalangan pemerintah maupun swasta sebagai bahan untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan. Di setiap aspek perencanaan pembangunan baik di bidang sosial, ekonomi, maupun politik memerlukan data kependudukan .

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk dan Kepadatannya Tahun 2015

Kecamatan	Penduduk			Sex	Kepadatan Penduduk
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Kaliwungu	46 131	47 326	93 457	97,48	2 857
02 Kota	47 529	50 432	97 961	94,24	9 354
03 Jati	51 907	54 349	106 256	95,51	4 040
04 Undaan	36 651	37 281	73 932	98,31	1 030
05 Mejobo	36 921	37 833	74 754	97,59	2 033
06 Jekulo	52 253	53 702	105 955	97,30	1 278
07 Bae	35 212	36 211	71 423	97,24	3 062
08 Gebog	50 323	51 466	101 789	97,78	1 849
09 Dawe	52 385	53 391	105 776	98,12	1 232
<b>Kab. Kudus</b>	<b>409 312</b>	<b>421 991</b>	<b>831 303</b>	<b>97,00</b>	<b>1 955</b>

Sumber : BPS Kabupaten Kudus

Jumlah penduduk Kabupaten Kudus tahun 2015 sebanyak 831.303 jiwa, terdiri dari 409.312 laki-laki dan 421.991 perempuan, dengan sex rasio sebesar 96,995. Angka tersebut mempunyai arti jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dari perempuan. Dari 100 perempuan hanya ada 97 laki-laki. Data menunjukkan laki-laki lebih

sedikit dari perempuan merata di semua kecamatan di Kabupaten Kudus.

Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Misalnya, karena adat dan kebiasaan jaman dulu yang lebih mengutamakan pendidikan laki-laki dibanding perempuan, maka pengembangan pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya laki-laki dan perempuan dalam umur yang sama. Informasi tentang rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Persebaran penduduk atau disebut juga distribusi penduduk menurut tempat tinggal dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu persebaran penduduk secara geografis dan persebaran penduduk secara administratif, disamping itu ada persebaran penduduk menurut klasifikasi tempat tinggal yakni desa dan kota. Apabila dilihat penyebarannya, maka kecamatan yang paling tinggi persentase jumlah penduduknya adalah Kecamatan Jati yakni sebesar 12,78 persen dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Kudus, kemudian berturut-turut Kecamatan Jekulo 12,75 persen, dan Kecamatan Dawe dengan nilai 12,72 persen. Sedangkan kecamatan

yang terkecil jumlah penduduknya adalah Kecamatan Bae sebesar 8,59 persen.

Informasi tentang distribusi penduduk secara geografis dan terkonsentrasinya penduduk di suatu tempat memungkinkan pemerintah mengatasi kepadatan penduduk, yang umumnya disertai dengan kemiskinan, dengan program pembangunan untuk mengurangi beban kepadatan penduduk atau melakukan realokasi pembangunan atau realokasi penduduk untuk bermukim di tempat lain.

Kepadatan penduduk berkaitan dengan daya dukung (*carrying capacity*) suatu wilayah. Indikator yang umum dipakai adalah Rasio Kepadatan Penduduk (*density ratio*) yaitu rasio yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada tahun tertentu.

Kepadatan penduduk dari waktu ke waktu cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Tahun 2015 tercatat sebesar 1.955 jiwa setiap km<sup>2</sup>. Di sisi lain penyebaran penduduk sangat tidak merata, Kecamatan Kota merupakan kecamatan yang terpadat penduduknya yaitu 9.354 jiwa per km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Undaan paling rendah kepadatan penduduknya yaitu 1.030 jiwa per km<sup>2</sup>.

Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya



manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan menyongsong era globalisasi. Menurut BPS, penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dan dibedakan sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dari jenis kegiatannya, angkatan kerja yaitu penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif meliputi kegiatan bekerja dan yang aktif mencari pekerjaan. Sedangkan untuk bukan angkatan kerja mencakup kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya. Pertumbuhan penduduk tiap tahun akan berpengaruh terhadap jumlah angkatan kerja.

Penghitungan Angka Partisipasi Angkatan Kerja dapat dilakukan dengan membandingkan antara jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam usia kerja.

Tabel 4.6 merupakan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2015, dari tabel tersebut dapat dihitung Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kudus yaitu sebesar 71,04 persen. Semakin tinggi nilai Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu.

Tabel 4.6 Penduduk Usia 15 Tahun keatas Menurut Jenis Kegiatan

### Hasil Sakernas Tahun 2015

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Angkatan Kerja</b>	<b>255 180</b>	<b>196 047</b>	<b>451 227</b>
Bekerja	238 874	189 626	428 500
Menganggur	16 306	6 421	22 727
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>53 575</b>	<b>130 346</b>	<b>183 921</b>
Sekolah	24 364	28 624	52 988
Mengurus Rumah Tangga	17 537	95 227	112 764
Lainnya	11 674	6 495	18 169
<b>Jumlah</b>	<b>308 755</b>	<b>326 393</b>	<b>635 148</b>

*Sumber : BPS, Sakernas 2015*

Pengangguran Terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka hasil Sakernas tahun 2015

adalah 5,04 persen. Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya, contohnya kriminalitas. Sebaliknya semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat. Sangatlah tepat jika pemerintah seringkali menjadikan indikator ini sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Sektor sekunder menjadi gantungan hidup sebagian besar tenaga kerja di Kabupaten Kudus, sekitar 48,16 persen yang meliputi lapangan usaha Listrik, Gas dan Air, Industri dan Konstruksi. Sektor lain sebagai gantungan hidup pekerja yang kedua adalah sektor tersier yang meliputi Perdagangan, Angkutan dan Komunikasi, Keuangan sebesar 42,76 persen, kemudian yang terakhir adalah sektor primer yang meliputi Pertanian, Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,08 persen.

Tabel 4.7 Penduduk 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kudus Hasil Sakernas

Tahun 2015

<b>Lapangan Usaha</b>	<b>Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase</b>
(1)	(2)	(3)
Sektor Primer	38 927	9,08
Sektor Sekunder	206 362	48,16
Sektor Tersier	183 211	42,76
<b>Jumlah</b>	<b>428 500</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS, Sakernas 2015

## **BAB V**

### **HASIL STUDI**

Berbagai aspek dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan, tidak saja dalam bentuk tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap. Aspek-aspek tersebut meliputi kemudahan masyarakat untuk dapat mengakses sarana dan prasarana tersebut, pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang diikuti dengan peningkatan lapangan pekerjaan, pemerataan pendidikan yang bermutu dan mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

IPM merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah, sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. Perkembangan angka IPM, memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada suatu daerah.

#### **5.1 Indeks Pembangunan Manusia**

Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Kudus diharapkan memberi dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Kudus dan sekitarnya, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan kualitas penduduk. Oleh karenanya perlu

dilakukan pemantauan dan evaluasi, salah satunya menggunakan set indikator pembangunan manusia, baik komposit maupun tunggal. Secara komposit adalah dengan melihat angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tabel 5.1 Nilai IPM Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2014 - 2015

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>IPM 2014</b>	<b>Peringkat</b>	<b>IPM 2015</b>	<b>Peringkat</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Blora	65,84	28 (6)	66,22	29 (6)
2. Rembang	67,40	20 (4)	68,18	20 (5)
3. Pati	66,99	22 (5)	68,51	19 (4)
4. Kudus	72,00	9 (1)	72,72	9 (1)
5. Jepara	69,61	15 (2)	70,02	15 (2)
6. Demak	68,95	17 (3)	69,75	17 (3)
<b>Jawa Tengah</b>	<b>68,78</b>		<b>69,49</b>	

*Sumber : Badan Pusat Statistik*

Berdasarkan hasil penghitungan, nilai IPM Kabupaten Kudus tahun 2015 adalah sebesar 72,72 dan berada pada peringkat 9 di Jawa Tengah. Nilai ini menunjukkan adanya kestabilan peringkat dibandingkan pada tahun 2014 yaitu dengan nilai IPM 72,00 dengan tetap berada peringkat 9 diantara kabupaten dan kota di Jawa

Tengah. Pada tingkat Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah angka IPM Kabupaten Kudus berada di peringkat 1 baik pada tahun 2014 dan 2015 (lihat tabel 5.1). Secara lengkap komponen yang membentuk IPM yaitu Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)/  $e^0$ , Harapan Lama Sekolah (Expected Years of Schooling (EYS)), Rata-rata Lama Sekolah (Mean Years of Schooling (MYS)) dan Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan (PPP) seperti yang ada pada tabel 5.2.

Tabel 5.2 Komponen IPM Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2015

Kabupaten/Kota	(AHH)/ $e^0$	EYS	MYS	Pengeluaran Per Kapita (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Blora	73,85	11,91	6,04	8,669
2. Rembang	74,22	12,02	6,92	9,122
3. Pati	75,63	11,79	6,71	9,380
4. Kudus	76,41	13,14	7,84	10,203
5. Jepara	75,65	12,27	7,31	9,504
6. Demak	75,21	12,43	7,45	9,118
<b>Jawa Tengah</b>	<b>73,96</b>	<b>12,38</b>	<b>7,03</b>	<b>9,930</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Kudus tahun 2015 sebesar 76,41 lebih tinggi bila dibandingkan dengan AHH Provinsi Jawa Tengah. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya AHH di Kabupaten Kudus adalah telah meningkatnya kesadaran penduduk terhadap kesehatan terutama kesehatan lingkungan. Oleh karena itu program pembangunan di bidang kesehatan dapat dilakukan dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk selalu menerapkan pola hidup sehat, meminimalkan angka kematian ibu dan anak, penyediaan air bersih, memperbaiki sanitasi dan meningkatkan pelayanan kesehatan.

Harapan Lama Sekolah (EYS) menunjukkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Pada tahun 2015, EYS di Kabupaten Kudus sebesar 13,14. Angka ini lebih besar dibandingkan capaian EYS Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 12,38. Namun demikian pemerintah Kabupaten Kudus harus tetap memprioritaskan program wajib belajar 12 tahun yang sudah dicanangkan sebagai program unggulan daerah sehingga capaian ini dapat ditingkatkan lebih baik pada tahun mendatang.

Sejalan dengan EYS, capaian untuk Angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) juga tinggi yaitu sebesar 7,84 tahun. Dengan kata lain, rata-rata penduduk di Kabupaten Kudus sudah menduduki tingkat kelas 1 SMP. Angka ini pun lebih tinggi bila dibandingkan



dengan angka Jawa Tengah sebesar 7,03 tahun.

Rata-rata pengeluaran konsumsi riil merupakan komponen dalam penyusunan Indeks Standar Hidup. Selanjutnya dilakukan penyesuaian (adjustment) dengan rumus Atkinson. Berbeda dengan komponen kesehatan dan pendidikan yang kontribusinya sulit diperbesar karena berkaitan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Pengeluaran riil yang disesuaikan akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraan penduduk sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Besaran nilai pengeluaran riil yang disesuaikan di Kabupaten Kudus pada tahun 2015 sebesar 10.202.843 rupiah. Angka ini berada di atas angka Provinsi Jawa Tengah sebesar 9.929.708 rupiah.

Untuk dapat menghitung nilai IPM, maka besaran komponen tersebut di buat angka indeksnya. Angka Indeks inilah yang nantinya akan dihitung dengan rata-rata geometrik untuk membentuk angka IPM.

## **5.2 Komponen Indeks Pembangunan Manusia**

Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk menikmati umur panjang, sehat, dan bisa menjalankan kehidupan yang produktif. Jadi tidak mengherankan jika tolok ukur tingkat keberhasilan pembangunan

salah satunya bisa dilihat dari sejauh mana nilai kualitas manusianya telah tercapai. Beberapa dimensi pengukuran kualitas hidup manusia antara lain dapat dilihat dari harapan hidup, tingkat kecerdasan dan tingkat kesejahteraan/kemakmuran. Berikut ulasan hasil studi terhadap komponen IPM di Kabupaten Kudus tahun 2015:

**a. Angka Harapan Hidup (AHH/e<sup>0</sup>)**

Banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur usia hidup tetapi dengan memperhatikan ketersediaan data secara global, UNDP memilih indikator angka harapan hidup waktu lahir. Angka harapan hidup secara konsep adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup idealnya dihitung dari data kematian menurut kelompok umur dan dengan bantuan *life table*. Karena data kematian menurut kelompok umur belum tersedia, maka dalam studi ini dihitung dengan program *mortpack* dan sebagai inputnya adalah rata-rata jumlah Anak Lahir Hidup (ALH) dan jumlah Anak Masih Hidup (AMH) dari hasil Susenas 2015.

Angka harapan hidup kabupaten Kudus pada tahun 2015 adalah sebesar 76,41 relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya di tahun 2014.

Tabel 5.3 Angka Harapan Hidup Kabupaten Kudus dan Kabupaten sekitarnya Tahun 2014-2015

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
(1)	(2)	(3)
1. Blora	73,84	73,85
2. Rembang	74,19	74,22
3. Pati	75,43	75,63
4. Kudus	76,40	76,41
5. Jepara	75,64	75,65
6. Demak	75,18	75,21
<b>Jawa Tengah</b>	<b>73,88</b>	<b>73,96</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistik*

#### **b. Tingkat Pendidikan**

Komponen tingkat pendidikan dihitung dengan dua indikator, yaitu Angka Harapan Lama Sekolah yang didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sedangkan indikator lainnya adalah rata-rata lama sekolah (MYS), indikator ini memberikan gambaran tentang rata-rata waktu yang ditempuh penduduk dalam kegiatan pembelajaran secara formal.

##### **1. Harapan Lama Sekolah (EYS)**

Indikator ini merupakan salah satu indikator output bidang pendidikan yang memberikan gambaran mutu sumber daya

manusia. Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 13,14 tahun pada tahun 2015 memberikan arti bahwa lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun ke atas adalah selama 13 tahun atau penduduk Kudus diharapkan bersekolah sampai perguruan tinggi pada tingkat 1. Dibanding keadaan tahun sebelumnya, angka Harapan Lama Sekolah ini mengalami sedikit kenaikan, 12,34 pada tahun 2013 menjadi 12,58 pada tahun 2014. Sedangkan posisi dengan daerah sekitar, menduduki posisi pertama di Eks Karesidenan Pati dan berada di atas angka Jawa Tengah (12,38).

## 2. Rata-rata Lama Sekolah (MYS)

Populasi yang digunakan UNDP dalam menghitung MYS dibatasi pada penduduk berusia 25 tahun ke atas. Mengingat penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah, sehingga belum pantas dinyatakan MYS nya. Namun dalam studi ini populasi yang digunakan adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas berkaitan dengan program wajib pendidikan dasar 9 tahun. Penghitungan MYS-nya memakai metode tidak langsung dengan memberikan bobot kepada tiap jenjang pendidikan yang ditamatkan sebagaimana dikemukakan pada Bab II.

Dari hasil studi didapatkan angka rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Kudus pada tahun 2015 sebesar 7,84 tahun. Bila angka ini dikonversikan ke jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan secara rata rata penduduk Kabupaten Kudus belum tamat SLTP. Dari enam kabupaten pembandingan, Kabupaten Kudus berada pada posisi pertama dan sudah berada diatas rata-rata Jawa Tengah. Rata-rata Jawa Tengah sebesar 7,03 tahun. Angka ini sejalan dengan hasil Susenas Jawa Tengah yang mengindikasikan masih banyak penduduk usia sekolah yang tidak/belum pernah sekolah.

Angka MYS Kabupaten Kudus dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami sedikit perubahan pada periode 2015 sebesar 7,84 naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 7,83. MYS Kudus tahun 2015 lebih tinggi dari MYS Jawa Tengah dan wilayah Bakorwil Pati. Hal ini sejalan dengan pemberlakuan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar Tahun 2012 dan hal ini merupakan wujud keseriusan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam meningkatkan kualitas masyarakat Kudus.

Tabel 5.4 Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kudus, Tahun 2014- 2015

Kabupaten/Kota	2014		2015	
	EYS	MYS	EYS	MYS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Blora	11,75	6,02	11,91	6,04
2. Rembang	11,46	6,90	12,02	6,92
3. Pati	11,24	6,35	11,79	6,71
4. Kudus	12,58	7,83	13,14	7,84
5. Jepara	12,25	7,29	12,27	7,31
6. Demak	11,84	7,44	12,43	7,45
<b>Jawa Tengah</b>	<b>12,17</b>	<b>6,93</b>	<b>12,38</b>	<b>7,03</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik

### **c. Pengeluaran riil per Kapita yang disesuaikan**

Pendekatan paritas daya beli merupakan pendekatan untuk penghitungan standar hidup layak, yang memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi dalam arti luas. Semakin meningkat pendapatan seseorang diharapkan paritas daya belinya makin meningkat pula. Tetapi hubungan ini tidak selalu benar terutama bila tingkat kenaikan pendapatan masih lebih rendah dari tingkat kenaikan harga secara umum.

Sebagai ilustrasi dapat digambarkan, apabila ada dua orang yang pendapatannya sama belum tentu mempunyai paritas daya beli yang sama bila tempat tinggal dua orang itu berbeda. Misalnya sama-sama berpendapatan 1 juta rupiah sebulan, yang satu tinggal di Kabupaten Kudus yang satu lagi tinggal di Jakarta, maka kemungkinan paritas daya belinya berbeda. Itulah sebabnya dalam penghitungan PPP dilakukan beberapa tahapan seperti dijelaskan pada Bab II.

Dari hasil penghitungan, diperoleh besarnya pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Kudus tahun 2015 sebesar 10,202,843 rupiah. Angka ini menunjukkan besarnya pengeluaran per kapita penduduk Kudus adalah yang terbesar diantara enam kabupaten yang tersebut di atas. Bahkan besaran pengeluaran per kapita penduduk Kudus lebih besar dari penduduk Jateng yang sebesar 9,929,708

rupiah. Dari tabel 5.5 terlihat adanya peningkatan pengeluaran per kapita penduduk Kudus dari tahun sebelumnya.

Tabel 5.5 Angka Pengeluaran per Kapita Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2014 – 2015 (ribuan rupiah)

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
(1)	(2)	(3)
1. Blora	8,568	8,669
2. Rembang	9,013	9,122
3. Pati	9,106	9,380
4. Kudus	10,102	10,203
5. Jepara	9,195	9,504
6. Demak	9,003	9,118
<b>Jawa Tengah</b>	<b>9,640</b>	<b>9,930</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistik*

### 5.3 Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM)

Hasil pembangunan manusia di Kabupaten Kudus selain tercermin dari indikator agregat IPM juga digambarkan dari pencapaian indikator tunggal yang terkait dengan kesejahteraan penduduk Kabupaten Kudus. Indikator tunggal tersebut meliputi indikator dibidang kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan. Pemantauan indikator-indikator tunggal tersebut sangat bermanfaat untuk mengenali aspek-



aspek yang dapat mempengaruhi perkembangan IPM.

Berikut ini disajikan indikator tunggal dari beberapa sektor yang mencakup indikator input, proses, dan output sebagai indikator pembangunan manusia. Indikator-indikator ini diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih jauh tentang pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Kudus.

### **1. Kesehatan**

Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Indikator utama yang digunakan untuk melihat derajat kesehatan penduduk salah satunya adalah Angka Harapan Hidup (*Life Expectancy at Birth*). Aspek penting lainnya yang ikut mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan yang antara lain diukur melalui Angka Kesakitan dan Rata-rata Lamanya Sakit.

Untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan, dan jenis pengobatan yang dilakukan. Oleh karena itu usaha untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan peningkatan jumlah sarana dan prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat

perlu mendapat perhatian utama.

Tabel 5.6 Banyaknya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Rumah Bersalin) menurut Kecamatan Tahun 2015

No	Kec	Pus kes mas	Puskes mas Pem bantu	Pus kes mas Pera watan	Pus kes mas Keliling	Klinik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kaliwungu	2	2	2	14	1
2	K o t a	3	4	0	13	11
3	J a t i	2	5	0	3	6
4	Undaan	2	4	1	2	2
5	Mejobo	2	4	2	1	1
6	Jekulo	2	7	2	7	3
7	B a e	2	3	0	1	9
8	Gebog	2	5	1	4	1
9	D a w e	2	6	2	11	1
	<b>Jumlah</b>	<b>19</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	<b>56</b>	<b>35</b>

Sumber : BPS, Kudus dalam Angka 2015

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat jumlah fasilitas pusat

kesehatan masyarakat yang ada di Kabupaten Kudus seperti Puskesmas sebesar 19, Pukesmas pembantu sebesar 40, Puskesmas perawatan sebesar 10, Puskesmas keliling sebesar 56, dan Klinik sebesar 35 yang masing-masing tersebar di semua Kecamatan.

Tabel 5.7 Banyaknya Puskesmas dan Dokter per Puskesmas Menurut kecamatan tahun 2015

No	Kecamatan	Puskesmas	Dokter Puskesmas	Rata-Rata Dokter per Puskesmas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kaliwungu	2	9	4,5
2	K o t a	3	8	2,7
3	J a t i	2	4	2,0
4	Undaan	2	6	3,0
5	Mejobo	2	10	5,0
6	Jekulo	2	7	3,5
7	B a e	2	3	1,5
8	Gebog	2	6	3,0
9	D a w e	2	8	4,0
	<b>Jumlah</b>	<b>19</b>	<b>61</b>	<b>3,2</b>

Sumber : BPS, Kudus dalam Angka 2015

Dari Puskesmas yang tersebar di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus, rata-rata terdapat 2 puskesmas di tiap kecamatan, hanya ada 3 puskesmas di Kecamatan Kota Kudus dengan jumlah dokter puskesmas keseluruhan sekitar 61 dokter, dengan rata-rata dokter puskesmas per puskesmas sekitar 3,2.

Tabel 5.8 Banyaknya Dokter menurut Keahlian dan Kecamatan Tahun 2015

No	Kecamatan	Spesialis	Umum	Gigi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kaliwungu	40	38	6
2	K o t a	43	37	7
3	J a t i	62	32	8
4	Undaan	0	6	1
5	Mejobo	0	0	1
6	Jekulo	1	7	1
7	B a e	0	3	2
8	Gebog	0	6	2
9	D a w e	0	8	2
	<b>Jumlah</b>	<b>146</b>	<b>137</b>	<b>30</b>

Sumber : BPS, Kudus dalam Angka 2015

Selain Dokter Puskesmas terdapat dokter menurut keahlian, seperti dalam tabel 5.10 dapat dilihat terdapat dokter spesialis 146 orang, kemudian dokter umum sebesar 137 orang, dan 30 orang adalah dokter gigi, total semua dokter menurut keahlian sebanyak 313 orang yang tersebar di tiap kecamatan di Kabupaten Kudus. Jumlah dokter spesialis terbanyak ada di kecamatan Jati, diikuti kecamatan Kota, sementara kecamatan dengan jumlah dokter spesialis terbesar selanjutnya berada di kecamatan Kaliwungu.

Selain tenaga kesehatan dokter yang ada di Kabupaten Kudus, ada tenaga kesehatan lainnya yaitu perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya. Jumlah perawat yang ada di Kabupaten Kudus sebanyak 1.209 orang yang terbagi 1.172 orang perawat umum dan 37 orang perawat gigi, kemudian bidan sebanyak 365 orang yang tersebar di 9 kecamatan, kemudian tenaga kesehatan lainnya yang terdiri dari sarjana muda gizi, apoteker dan asisten apoteker yang jumlahnya sebanyak 187 orang.

Dari Tabel 5.9 terlihat bahwa jumlah perawat dan tenaga kesehatan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan jumlah perawat umum terhitung sangat signifikan dari 1070 orang pada tahun 2014 menjadi 1172 orang pada tahun 2015. Kenaikan juga terjadi pada jumlah perawat gigi yaitu dari tahun lalu yang berjumlah 32 menjadi 37 orang. Jumlah apoteker yang terbesar ada di Jati yaitu sebanyak 19 orang.

Tabel 5.9 Banyaknya Perawat, Bidan dan Tenaga Kesehatan Lainnya menurut Kecamatan Tahun 2015

No	Kec	Jumlah Perawat				Bidan	Tenaga Kesehatan Lainnya		
		Umum	PK C	PK E	Gigi		Sar mud Gizi	Apo teker	Asis ten Apo teker
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kaliwungu	220	0	0	9	60	4	5	26
2	Kota	129	0	0	4	77	7	3	22
3	Jati	715	0	0	9	100	7	19	58
4	Undaan	17	0	0	2	20	2	0	2
5	Mejobo	19	0	0	3	28	2	1	1
6	Jekulo	27	0	0	3	29	3	2	4
7	Bae	11	0	0	2	14	2	0	2
8	Gebog	16	0	0	3	18	3	2	1
9	Dawe	18	0	0	2	19	1	6	2
	<b>Jumlah</b>	<b>1.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>365</b>	<b>31</b>	<b>38</b>	<b>118</b>

Sumber : BPS, Kudus dalam Angka 2015

Taraf kesehatan penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti upaya kesehatan, perilaku, lingkungan, status gizi, dan juga keturunan. Salah satu indikator yang bisa digunakan untuk mengetahui taraf kesehatan penduduk adalah angka kesakitan

(*morbidity rate*). Data mengenai angka kesakitan penduduk dapat diketahui melalui pendekatan angka keluhan sakit selama satu bulan yang lalu (selama satu bulan yang berakhir satu hari sebelum survei).

Angka kesakitan merupakan rasio antara jumlah orang yang mengalami keluhan kesehatan terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Kesakitan yang dimaksud disini bukan jenis penyakit tertentu, tapi satu/beberapa jenis keluhan kesehatan karena satu jenis penyakit. Jenis keluhan ada yang dipengaruhi musim, ada juga yang sifatnya menahun.

Tabel 5.10 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Satu Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kudus Tahun 2014–2015

No	Tahun	Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Satu Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2014	21,94	22,07	22,00
2	2015	27,90	27,16	27,53

Sumber : BPS, Susenas 2014, Susenas 2015

Untuk persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dalam satu bulan terakhir menurut jenis kelamin di

Kabupaten Kudus pada tahun 2015 sebesar 27,90 persen untuk laki-laki dan 27,16 persen untuk perempuan serta total sebesar 27,53 persen, bila di banding pada tahun 2014 terdapat 21,94 persen untuk laki-laki dan 22,07 persen untuk perempuan dengan total sebesar 22,00 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2014.

Berobat jalan adalah kegiatan atau upaya anggota rumah tangga yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah anggota rumah tangga.

Tabel 5.11 Persentase Kunjungan Penduduk yang Berobat Jalan Dalam Satu Bulan Terakhir Menurut Tempat Berobat di Kabupaten Kudus Tahun 2014 – 2015

No	Tahun	Tempat Berobat					
		Rumah Sakit	Praktek Dokter /Poliklinik	Puskesmas /Pustu	Praktek Nakes	UKB M	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2014	6,02	41,54	18,02	32,55	-	1,87
2	2015	12,22	69,48	17,39	-	1,41	4,22

Sumber : BPS, Susenas 2014, Susenas 2015



Dari tabel 5.13 tersebut diatas tempat berobat favorit yang menjadi pilihan warga Kudus di tahun 2014 yaitu Praktek Dokter/Politeknik sebesar 69,48 persen. Praktek Nakes juga menjadi salah satu tempat alternatif untuk berobat, dimungkinkan karena biayanya murah dan besarnya ketersediaan tenaga keseharan di tiap kecamatan seperti yang sudah dirinci pada Tabel 5.11.

Salah satu indikator dari pemanfaatan pelayanan kesehatan adalah penolong persalinan. Indikator ini dihitung sebagai persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga terdidik seperti dokter, bidan dan tenaga medis lainnya. Indikator ini cukup memegang peranan penting dalam melihat kondisi kesehatan suatu daerah karena dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan kesehatan terutama pada saat kelahiran dimana resiko kematian amat tinggi.

Untuk persentase balita menurut penolong kelahiran pertama di Kabupaten Kudus pada tahun 2014 terbanyak adalah bidan yaitu sebesar 79,40 persen, kemudian terbanyak kedua sebesar 19,23 persen adalah dokter disusul dukun sebesar 0,78 persen, sedangkan pada tahun 2015 penolong kelahiran pertama di kabupaten Kudus masih didominasi bidan yaitu sebesar 64,15 persen, kemudian dokter, dukun, tenaga medis lain masing – masing sebesar 32,24 persen, 2,27 persen, dan 1,34 persen.

Tingginya persentase penolong kelahiran oleh bidan

dimungkinkan terjadi karena tempat praktik bidan lebih dekat dengan tempat tinggal sehingga lebih mudah dihubungi apalagi keberadaan bidan sudah merata di setiap desa. Hal lain yang mendukung terkait dengan biaya melahirkan di bidan yang relatif lebih murah.

Tabel 5.12 Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama di Kabupaten Kudus Tahun 2014 - 2015

No	Penolong Kelahiran Pertama	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dokter	19,23	32,24
2	Bidan	79,40	64,15
3	Tenaga Medis Lain	0,00	1,34
4	Dukun	0,78	2,27
5	Famili	0,59	0,00
6	Lainnya	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS, Susenas 2014, Susenas 2015

## 2. Perumahan

Pembangunan yang berkenaan dengan tempat tinggal adalah proses yang tanpa akhir walaupun berbagai keberhasilan telah dicapai. Pada dasarnya pembangunan tempat tinggal dan lingkungan adalah kewajiban masyarakat sendiri, sedangkan pemerintah dalam

hal ini berkewajiban memberikan bantuan dan kemudahan serta menciptakan kondisi atau iklim yang serasi untuk mendorong ke arah tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat yang mandiri secara gotong-royong.

Tabel 5.13 Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2014 – 2015

No	Kecamatan	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kaliwungu	22 815	22 923
2	K o t a	23 966	24 207
3	J a t i	26 066	26 383
4	Undaan	20 018	20 269
5	Mejobo	17 976	18 205
6	Jekulo	25 835	26 171
7	B a e	17 440	17 678
8	Gebog	24 588	24 952
9	D a w e	26 087	26 541
	<b>Jumlah</b>	<b>204 791</b>	<b>207 329</b>

Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk 2014-2015

Hasil Proyeksi Penduduk tahun 2014-2015 menunjukkan

bahwa banyaknya rumah tangga di Kabupaten Kudus pada tahun 2015 tercatat sebesar 207.329 rumah tangga. Bila dibandingkan dengan angka Proyeksi Penduduk pada tahun sebelumnya terjadi peningkatan jumlah rumah tangga dimana pada tahun 2014 tercatat sebesar 204.791 rumah tangga, sehingga bisa dihitung ada persentase peningkatan sebesar 1,24 persen.

Tempat tinggal merupakan salah satu dari tiga kebutuhan pokok manusia di samping sandang dan pangan. Pada saat ini tempat tinggal tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung tetapi fungsinya sebagai tempat tinggal lebih menonjol. Bahkan rumah sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan status simbol serta juga menunjukkan identitas pemiliknya. Di Kabupaten Kudus kondisi bangunan tempat tinggal cukup beragam. Kondisi bangunan dapat dilihat dari luas lantai, jenis lantai, jenis dinding dan jenis atap.

Pada Tabel 5.14, tercatat sekitar 90,83 persen rumah tangga di Kabupaten Kudus pada tahun 2015 tinggal di rumah milik sendiri. Sedangkan yang mengontrak/sewa pada tahun 2015 sebesar 1,99 persen. Sebagian penduduk masih menempati rumah yang bebas sewa yaitu sebesar 7,05 persen dan sebagian yang lain bertempat tinggal di Lainnya yaitu sebesar 0,13 persen.

Tabel 5.14 Persentase Rumah Tangga menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Kabupaten Kudus Tahun 2014- 2015

No	Status Penguasaan Bangunan Tempat tinggal	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Milik sendiri	90,10	90,83
2	Kontrak/Sewa	1,59	1,99
3	Bebas sewa	8,17	7,05
4	Dinas	0,14	0,00
5	Lainnya	0,00	0,13
	<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS, Susenas 2014, Susenas 2015

Sedangkan rumah tangga dengan status penguasaan bangunan tempat tinggal milik sendiri mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Demikian juga dengan rumah tangga yang memilih rumah kontrak/sewa sebagai pilihan untuk tempat tinggal juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Kondisi bangunan lain bisa dilihat dari luas lantai rumah tangga. Luas lantai yang dimaksud dalam Susenas adalah luas lantai yang biasanya ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari

tidak dimasukkan dalam penghitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (lamporan semen), dan ruangan khusus untuk usaha (misalnya warung).

Untuk bangunan bertingkat luas lantainya merupakan jumlah luas dari setiap tingkat yang ditempati. Luas lantai hunian suatu rumah tangga berhubungan erat dengan faktor kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan anggota rumah tangga. Apabila luas lantai sempit, maka kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan anggota rumah tangga cenderung berada pada kualitas yang rendah. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah yang memiliki luas lantai minimal 50 m<sup>2</sup>.

Pada tahun 2015 di Kabupaten Kudus sekitar 78,39 persen rumah tangga tinggal dalam bangunan dengan luas lantai yang berukuran 54 meter persegi ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Kudus sudah menempati bangunan tempat tinggal yang memenuhi salah satu syarat rumah layak dan sehat. Kabupaten Kudus merupakan daerah industri sehingga banyak juga rumah tangga atau sekelompok orang maupun perorangan yang memerlukan tempat tinggal dengan cara tinggal bersama dengan orang lain dalam satu bangunan, baik dengan cara sewa/kontrak rumah atau kamar maupun bebas sewa tanpa memerlukan lantai hunian yang luas.

Tabel 5.15 Persentase rumah Tangga menurut Luas lantai  
Bangunan Tempat Tinggal Kabupaten Kudus  
Tahun 2014 - 2015

No	Luas Lantai Bangunan	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<21	0,69	0,68
2	21-35	4,27	4,86
3	36-44	6,16	7,39
4	45-53	7,50	8,68
5	54+	81,38	78,39
	<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS, Susenas 2014, Susenas 2015

Indikator kondisi perumahan lain adalah kebutuhan air bersih yang layak untuk dikonsumsi . Tersedianya sumber air minum (terutama ledeng) juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga yang dianggap paling vital karena kebutuhan akan air bersih sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 5.16 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber  
Air Minum di Kabupaten Kudus Tahun 2014 - 2015

No	Sumber Air Minum	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Air dalam kemasan	25,62	24,22
2	Leding	12,28	14,93
3	Sumur bor/pompa	18,87	21,29
4	Sumur terlindung	34,66	31,99
5	Sumur tak terlindung	1,99	2,48
6	Mata air terlindung	5,11	2,75
7	Mata air tak terlindung	1,47	1,60
8	Air Sungai	0,00	0,20
9	Lainnya	0,00	0,54
	<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS, Susenas 2014, Susenas 2015

Persentase rumah tangga menurut Sumber air minum menunjukkan belum meluasnya jaringan air minum yang dikelola Perusahaan Air Minum Daerah atau PDAM. Hal ini dimungkinkan karena sumber-sumber air minum belum meluas sampai ke daerah atau pedesaan. Selain itu sumber air minum yang lain seperti sumur terlindung yang masih relatif banyak, sehingga masih banyak rumah



tangga yang memakai air sumur. Kemungkinan yang lain karena untuk berlangganan sumber air ledeng diperlukan biaya yang lebih besar.

Pemenuhan kebutuhan air bersih sebagai bagian hidup masyarakat telah mulai terasa di kalangan masyarakat Kudus, meskipun persentase penggunaan sumber air minum dengan sumber air sumur bor/pompa mengalami kenaikan dari 18,87 persen di tahun 2014 menjadi 21,29 persen di tahun 2015. Namun untuk penggunaan Leding sebagai sumber air minum mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar 12,28 menjadi 14,93 persen di tahun 2015. Penggunaan sumber air minum tahun 2015 dari sumur terlindung sebesar 31,99 persen, sumur tak terlindung 2,48 persen dan mata air terlindung 2,75 persen. Untuk penggunaan mata air terlindung mengalami kenaikan dari 5,11 persen pada tahun 2014 menjadi 2,75 persen di tahun 2015.

Sanitasi rumah sangat bergantung pada sistem pembuangan air besar, ini juga berkaitan erat dengan resiko kesehatan. Tempat/cara pembuangan yang kurang baik akan menyebabkan lingkungan tempat tinggal tercemar, baik pencemaran udara maupun pencemaran sistem sanitasi rumah. Sarana pembuangan air besar yang baik seharusnya memiliki penampungan akhir yang terlindung, yaitu tersedianya tangki-tangki penampungan kotoran.

Tabel 5.17 Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar Bangunan Tempat Tinggal di Kab. Kudus tahun 2014 – 2015

No	Fasilitas Tempat Buang Air Besar Bangunan Tempat Tinggal	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sendiri	86,27	87,25
2	Bersama	8,27	8,58
3	MCK Komunal	-	0,10
3	Umum	0,14	0,16
4	Tidak ada	5,32	3,91
	<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS, Susenas 2014, Susenas 2015

Di Kabupaten Kudus, ada sekitar 87,25 persen rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar secara sendiri dan sekitar 8,58 persen memakai fasilitas tempat buang air besar secara bersama. Selain itu, persentase rumah tangga yang tidak mempunyai fasilitas tempat buang air besar sebesar 3,91 persen, kemudian yang menggunakan fasilitas umum sebesar 0,16 persen pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian penduduk sudah mengetahui dan menyadari akan arti kebersihan lingkungan.

### **3. Pendidikan**

Pendidikan merupakan proses pemberdayaan peserta didik sebagai subyek sekaligus obyek dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Pembangunan di bidang pendidikan meliputi pembangunan pendidikan secara formal maupun non formal. Pendidikan sangat berperan sebagai faktor kunci dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka untuk keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan memerlukan peran serta yang aktif tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari masyarakat.

Titik berat pendidikan formal adalah peningkatan mutu pendidikan dan perluasan pendidikan dasar. Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan pemerintah misalnya dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, perbaikan kurikulum, dan program wajib belajar 12 tahun. Dengan semakin lamanya usia wajib belajar ini diharapkan tingkat pendidikan akan semakin membaik dan akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk.

Ijazah/STTB merupakan tanda seseorang sudah menamatkan suatu jenjang pendidikan formal. Persentase penduduk tertinggi yang memiliki ijazah/STTB pada jenjang tertentu, menunjukkan rata-rata tingkat pendidikan penduduk di suatu daerah. Tingginya tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh rata-rata penduduk di suatu daerah

dapat mencerminkan taraf intelektualitas daerah tersebut, status sosial ekonomi penduduk, kemampuan wawasan, dan pola pikir penduduk.

Tabel 5.18 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Kudus Tahun 2014 - 2015

No	Tingkat/Jenjang Pendidikan Tertinggi	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tdk punya ijazah SD	20,02	20,98
2	SD	28,54	30,07
3	SMP	22,43	21,25
4	SMA	23,45	21,67
5	Perguruan Tinggi	5,57	6,04
	<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS, Susenas 2014, Susenas 2015

Dari tabel di atas dapat dilihat sebagian besar tingkat atau jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk 10 Tahun ke atas adalah SD yaitu sebesar 30,07 persen pada tahun 2015, kemudian SMA maupun SMK sebesar 21,67; selanjutnya urutan ketiga tamatan SMP 21,25 persen pada tahun 2015, selanjutnya Perguruan Tinggi yang meliputi D1,D2,D3,D4,S1,S2 maupun S3 sebesar 6,04 persen pada tahun 2015.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Indeks Pembangunan Manusia adalah sebuah ukuran dari hasil akhir upaya pembangunan manusia, dan manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Oleh karena itu tujuan dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menjalankan kehidupan yang produktif. Dalam perspektif pembangunan manusia adalah melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat, tidak hanya sektor ekonomi dan sosial saja akan tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

#### **6.1 Kesimpulan**

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia. Dalam kerangka demikian, pembangunan nasional sesungguhnya menempatkan manusia sebagai obyek (tujuan) sekaligus subyek (pelaku) pembangunan atau menempatkan manusia sebagai titik sentral.

Selama ini seperti ada anggapan bahwa dengan adanya

pembangunan ekonomi akan terjadi juga pembangunan manusianya. Kenyataannya tidak demikian, banyak daerah yang perekonomiannya maju pesat, ternyata tidak dibarengi dengan pesatnya pembangunan manusia, walaupun memang ada korelasi positif bahwa pembangunan perekonomian sangat membantu pembangunan manusianya.

IPM Kabupaten Kudus mengalami peningkatan sejak empat tahun terakhir, pada tahun 2012 IPM Kabupaten Kudus sebesar 70,57 dan di tahun 2013 IPM Kabupaten Kudus meningkat menjadi sebesar 71,58. Di tahun berikutnya 2014 IPM Kudus menjadi 72,00 dan meningkat kembali di tahun 2014 menjadi 72,72.

Keberadaan IPM memerlukan analisis situasi pembangunan manusia guna melihat indikator tunggal dari komponen-komponen pendukung IPM, yang mencakup beberapa aspek diantaranya adalah : kesehatan, pendidikan, perekonomian, ketenagakerjaan, dan perumahan. Dari komponen kesehatan diperoleh angka yang mengindikasikan peningkatan angka harapan hidup. Angka harapan hidup Kabupaten Kudus pada tahun 2015 adalah sebesar 76,41 sama jika dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya di tahun 2014. Untuk mempercepat peningkatan nilai IPM diperlukan pendukung khususnya untuk Angka Harapan Hidup, karena angka ini terlihat lebih rendah dari Kabupaten sekitar dan Jawa Tengah.

Angka harapan lama sekolah Kabupaten Kudus sebesar 13,14 pada tahun 2015 memberikan arti bahwa lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun ke atas adalah selama 13 tahun atau penduduk Kudus diharapkan bersekolah sampai perguruan tinggi kelas 1. Untuk angka rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Kudus pada tahun 2015 sebesar 7,84 tahun. Bila angka ini dikonversikan ke jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan secara rata rata penduduk Kabupaten Kudus belum tamat SLTP (dimana rata-rata sekolah normal sekitar 9 tahun). Besaran pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Kudus tahun 2015 sebesar 10,202,843 rupiah. Tertinggi diantara kabupaten sekitarnya dan melebihi angka pengeluaran per kapita penduduk di Jawa Tengah.

Tempat tinggal yang ideal tentunya dalam kondisi yang baik, cukup luas, terbuat dari bahan-bahan bangunan yang bermutu baik dan memenuhi syarat kesehatan. Kondisi tempat tinggal dan fasilitas pokok perumahan secara umum di Kabupaten Kudus menunjukkan perbaikan kualitas, tetapi kondisi yang telah dicapai masih perlu peningkatan, karena masih tertinggal dengan beberapa daerah perkotaan lainnya di Jawa Tengah.

## **6.2 Saran Rekomendasi**

Untuk meningkatkan IPM memerlukan upaya peningkatan komponen komponen pendukung IPM (kesehatan, pendidikan dan perekonomian). Peningkatan Anggaran pendidikan dan kesehatan di APBD baik untuk pembangunan infrastruktur maupun untuk peningkatan akses penduduk terhadap fasilitas kesehatan dan program wajib belajar 12 tahun.

Di bidang kesehatan dengan meningkatkan pemerataan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun oleh swasta diharapkan mampu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang meningkat terutama bagi penduduk miskin dan keluarga dengan bayi, balita, anak usia sekolah, ibu hamil, dan usia lanjut akan mampu memperluas kesempatan masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan yang ada.

Peningkatan bidang pendidikan memerlukan penanganan tersendiri. Meskipun capaian angka rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf Kabupaten Kudus tergolong tinggi, namun masih dijumpai penduduk berusia sekolah yang belum/tidak sekolah dan juga yang sudah tidak bersekolah lagi (hanya lulus SD atau drop out). Selain dari segi kuantitas, perlu juga meningkatkan mutu pendidikan dari kualitasnya. Kualitas pendidikan yang baik akan



memunculkan generasi-generasi muda yang cerdas, terampil dan bertaqwa sehingga kualitas hidup masyarakat mendatang akan semakin baik.

Peningkatan efisiensi dan efektifitas program-program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan manusia dengan membentuk lembaga yang berfungsi melakukan koordinasi terhadap program-program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan manusia lintas sektor. Perlu ditumbuhkembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi baru yang dapat meningkatkan pendapatan penduduk, terutama penduduk miskin, yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kemauannya oleh dinas/instansi yang membina pengusaha mikro, kecil menengah dan koperasi.

# **DATA**

## **MENCERDASKAN BANGSA**



**BADAN PUSAT STATISTIK KAB. KUDUS**

**Jl. Mejobo Komp. Perkantoran Kudus 59319**

**Telp/Fax : (0291) 433382 / (0291) 4251140**

**E-mail : [bps3319@bps.go.id](mailto:bps3319@bps.go.id)**

**Website : [kuduskab.bps.go.id](http://kuduskab.bps.go.id)**